

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Kabupaten Cirebon, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 akibat gencarnya iklan dan sponsor yang ada di masyarakat yang mengakibatkan banyaknya perokok-perokok baru dari akibat melihat promosi rokok di wilayahnya yang begitu gencar, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam pengedaran bahan yang mengandung zat adiktif.
2. Faktor penghambat dari implementasi Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, diantaranya dari lingkungan, teman-temannya, keluarga yang kurang tegas, pengaruh sekitar yang mayoritas merokok, dan sudah kecanduan. Kemudian, faktor pendukungnya adalah pengawasan orang tua yang lebih ketat, kolaborasi antara pemerintah desa dan daerah tentang bahaya rokok agar lebih kuat lagi, memperbanyak tentang informasi bahayanya merokok, serta pengadaan denda bagi pelanggar.
3. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah No.109/2012 merupakan salah satu tanggung jawab pemerintahan Kabupaten Cirebon dalam prinsip fiqh siyasah sebagai bentuk tanggung jawab dalam mencegah dari *mufsadah* ( kerusakan ) yang ada dalam kandungan rokok. Peraturan Pemerintah No.109/2012 termasuk dalam Fiqh Siyasah Dusturiyyah yang membahas tentang masalah perundang-undangan yang sesuai syariat islam.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan, terkait dengan Implementasi Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Kabupaten Cirebon, adapun saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah Kabupaten Cirebon, dapat memperkuat Peraturan Bupati dengan cara menggantinya dengan Peraturan Daerah. Penggantian Peraturan Bupati ke Peraturan Daerah diharapkan agar pelanggar dapat diberikan sanksi berupa pidana, sanksi atau administratif supaya menimbulkan efek jera untuk pelanggar. Pemerintah juga dapat memperbanyak sosialisasi akan Peraturan Pemerintah No. Tahun 2012 agar masyarakat tahu akan efek negatif rokok.
2. Untuk warung yang menjual rokok agar tidak memberikan rokok pada anak di bawah umur, dan anak dibawah umur agar mendapatkan pendidikan berupa seminar, work shop bahkan sosialisasi tentang dampak negatif merokok.
3. Untuk orang tua juga memperketat pengawasan pada anak-anak nya agar tidak terjebak pada perilaku merokok serta orang dewasa yang merokok seharusnya tidak merokok di kawasan yang memang dilarang sesuai Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah yang berlaku.